

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

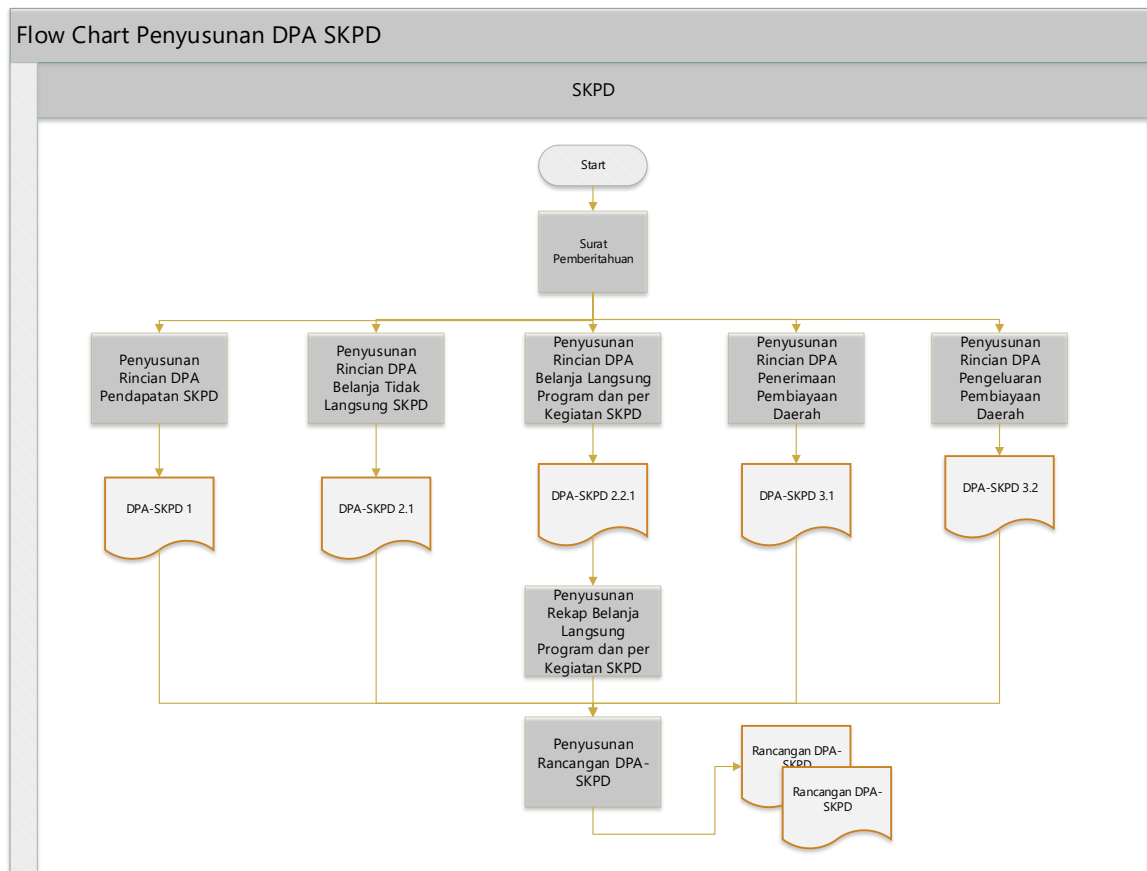
3.1. Analisis Sistem

Analisis sistem dalam pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan mempelajari prosedur-prosedur, diagram alir kerja (*flow work diagram*) dari sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara manual. Kemudian dari prosedur-prosedur dan diagram alir kerja (*flow work diagram*) akan didapatkan solusi-solusi. Diantaranya adalah kebutuhan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*), desain sistem (diagram berjenjang dan diagram alir data), desain database dan desain antarmuka.

3.1.1. Prosedur dan Diagram Alir Kerja Akuntansi Pemerintah Daerah

Berikut adalah prosedur-prosedur dan diagram alir kerja pada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 :

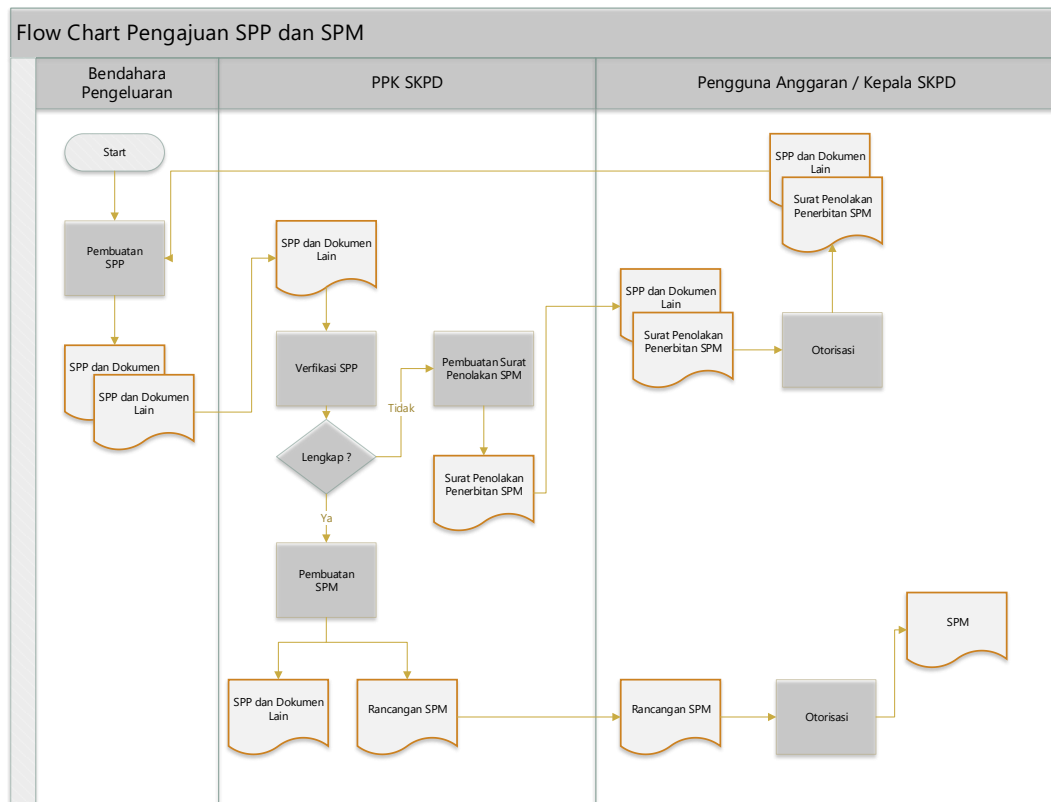
a. Penganggaran



Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Penganggaran / Penyusunan DPA SKPD

Usai memperoleh Surat Pemberitahuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Maka SKPD kemudian melakukan penyusunan DPA SKPD dari DPA 1 (Pendapatan), DPA 2.1 (Belanja Tidak Langsung), DPA 2.2.1 (Belanja Langsung), DPA 3.1 (Penerimaan Pembiayaan Daerah), DPA 3.2 (Pengeluaran Pembiayaan Daerah) yang akan di kompilasi untuk disusun menjadi Rancangan DPA-SKPD. Dokumen DPA ini nantinya yang akan menjadi dasar Pelaksanaan APBD bagi masing-masing SKPD.

b. Penatausahaan Belanja (Pengajuan SPP dan SPM)



Gambar 3.2 Diagram Alir Proses Pengajuan SPP dan SPM

Proses pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dimulai dari Bendahara Pengeluaran SKPD menyusun SPP berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Lembar SPP dan dokumen pendukung lainnya (SPJ, dll) akan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan (PPK) untuk kemudian dilakukan verifikasi. Apabila Dokumen pengajuan SPP lengkap dan tidak melebihi anggaran maka oleh PPK akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diajukan ke Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) untuk diotorisasi / ditandatangani.

Dokumen SPP yang tidak lengkap atau pengajuan melebihi anggaran akan diterbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM oleh PPK untuk kemudian di-otorisasi oleh Pengguna Anggaran dan dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran.

3.1.2. Representasi Model/Data

Berikut adalah Representasi Model/Data dari penggunaan basis akrual pada Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, dan perbedaannya dengan basis kas.

Contoh 1 (Kasus Pendapatan Daerah dari Hotel) :

Pada tanggal 4 April 2019 Pemerintah Daerah Lamongan menetapkan bahwa hotel C diharuskan membayar pajak reklame untuk tahun 2019 sebesar Rp. 150 juta. Pemda Lamongan menerima pembayaran pada tanggal 3 Mei 2019.

Basis Kas :

Tanggal 3 Mei 2019

Dr. Kas	150.000.000
Cr. Pendapatan Pajak Reklame	150.000.000

Basis Akrual :

Tanggal 4 April 2019

Dr. Piutang Pajak Reklame	150.000.000
Cr. Pendapatan Pajak Reklame	150.000.000

Tanggal 3 Mei 2019

Dr. Kas	150.000.000
Cr. Piutang Pajak Reklame	150.000.000

Contoh 2 (Kasus Belanja Alat Tulis Kantor) :

Pada tanggal 3 Februari 2019, diterima tagihan pembelian ATK sebesar Rp. 10 juta. Pembelian ini dilakukan pada tanggal 20 Januari 2019, sedangkan pembayaran dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019 dari rekening kas daerah.

Basis Kas :

Tanggal 14 Februari 2019

Dr. Belanja ATK	10.000.000
Cr. Kas	10.000.000

Basis AkruaI :

Tanggal 3 Feb 2019

Dr. Beban ATK	10.000.000
Cr. Utang Pemasok	10.000.000

Tanggal 14 Februari 2019

Dr. Utang Pemasok	10.000.000
Cr. Kas	10.000.000

Dari 2 contoh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa : basis kas tidak menampilkan jurnal transaksi se-akurat dan se-detail menggunakan basis akrual, basis kas hanya mencatat transaksi saat kas/uang diterima atau keluar saja. Sedangkan akrual akan mencatat kejadian tidak terbatas hanya saat kas diterima atau keluar saja. Contoh 1, menggambarkan basis akrual sudah mencatat transaksi saat penetapan pajak untuk hotel C dan dianggap sebagai piutang pajak. Contoh 2, menggambarkan basis akrual mencatat transaksi pembelian ATK yang barangnya diterima dulu dan dibayarkan kemudian sehingga dicatat sebagai utang.

3.1.3. Pengembangan Sistem

Seperti sudah disampaikan di bab sebelumnya tentang perkembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berbasis komputer yang menceritakan periode dan tahapan penggunaan sistem informasi dalam perjalanan transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka dapat disimpulkan kondisi sistem sebelumnya dan rencana pengembangan sistem yang akan dibangun.

3.1.3.1 Sistem Informasi Akuntansi Sebelumnya

Pada periode 2006-2008 telah dirancang dan dibangun suatu sistem informasi akuntansi yang merupakan adaptasi dari transaksi keuangan seusia dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan penyempurnaannya yaitu Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Saat itu sistem dibangun dengan menggunakan platform *visual basic* yang berbasis desktop. Karena berbasis desktop, maka instalasi dilakukan pada setiap Personal Computer (PC) *client/user* yang terlibat dalam transaksi keuangan di SKPD atau PPKD.

Saat itu, ketika terdapat *update* atau perubahan yang terjadi pada sistem informasi maka semua PC akan dilakukan re-instal atau *update patch* baik yang bersifat manual ataupun otomatis. Kondisi ini tentu sangat memberatkan, selain jumlah PC begitu banyak, terkadang tidak semua PC dapat terupdate dengan sempurna, bisa jadi karena kondisi jaringan atau *network* yang menghubungkan server dan client tidak stabil atau *down*.

3.1.3.2 Rencana Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem yang akan dibangun adalah Sistem Informasi Akuntansi berbasis web dengan platform PHP, yang akan mengadopsi Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Dengan berbasis web maka instalasi aplikasi cukup dilakukan di sisi server, PC user yang bertindak sebagai client akan melakukan penarikan dan pengiriman data dari dan ke server dengan antarmuka yang telah tersedia.

Kondisi ini tentu berbeda dengan sistem informasi sebelumnya yang berbasis desktop. Setiap update dan perubahan sistem informasi baik di sisi aplikasi dan di sisi database akan dilakukan di server, yang tentunya menghemat waktu, tenaga atau mungkin biaya.

Rencana pengembangan lainnya dari sistem yang akan dibangun adalah penyediaan fasilitas approval atau otorisasi secara online bagi pejabat atau pengguna anggaran yang berwenang melakukan approval.

Misalnya pada saat pengajuan SPP-LS (Langsung) Barang, ketika Bendahara Pengeluaran selesai membuat SPP melalui Sistem Informasi kemudian Bendahara Pengeluaran akan menunggu approval yang telah dikirim notifikasinya (bisa melalui email) ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang terlibat dalam Belanja pada SPP-LS tersebut.

Tentunya ini cukup memangkas rantai panjang yang selama ini terjadi pada kondisi sebelumnya, di mana ketika SPP-LS sudah dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, maka lembar SPP-LS tersebut harus dicetak dan menunggu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan tanda tangan pada lembar tersebut. Problemanya mungkin bisa bermacam-macam, PPTK sedang tidak ada di tempat atau melakukan perjalanan dinas, atau suatu waktu lembar tersebut hilang atau terselip sehingga terlupa untuk dilakukan tanda tangan.

3.1.4. Model Pengembangan Sistem

Dalam pengembangan sistem ini, penulis menggunakan pemodelan *waterfall*. Pemodelan klasik ini menurut penulis adalah pemodelan yang paling pas, mengingat kondisi sistem akuntansi sebelumnya yang telah dijelaskan pada pengembangan sistem. Tahap-tahapan pengembangan sistem antara lain :

1. Analisa Kebutuhan

Dengan mengevaluasi sistem informasi sebelumnya yang telah berjalan, kebutuhannya antara lain :

- Sistem informasi berbasis web
- Sistem informasi sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri tentang akrual
- Kebutuhan transaksi-transaksi yang digunakan
- Permintaan output berupa pelaporan yang dihasilkan dan

2. Desain Sistem

Desain sistem disesuaikan dengan analisa kebutuhan sistem, tidak menutup kemungkinan perlu dilakukan wawancara dengan user atau entitas atau unit kerja yang terkait untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat personal demi kebaikan sistem

3. Pengembangan / *Development*

Pengembangan sistem menjadi periode yang sangat penting dalam siklus hidup aplikasi. Semua kebutuhan yang telah dicatat sebelumnya dan desain sistem yang telah dirancang akan dituangkan semua ke dalam sebuah sistem. Bagaimana proses menerjemahkan setiap item pada permintaan desain sistem ke dalam sistem informasi yang baik.

4. Pengujian

Pengujian sistem bisa dilakukan sesuai dengan unit kerja terkait yang terlibat dalam aplikasi. Masing-masing bisa melakukan pengecekan dan menentukan kevalidan integritas data. Input oleh satu entitas akan diterima dengan baik oleh entitas yang lain. Pun begitu pelaporan yang dihasilkan juga sesuai dan benar.

5. Pemeliharaan / *Maintenance*

Setelah proses pengujian dan aplikasi diluncurkan, maka yang tidak kalah penting adalah tahapan pemeliharaan sistem. Tahapan ini bisa berarti perbaikan sistem setelah sistem berjalan, atau perbaikan dari sisi basis data. Proses ini akan berakhir jika dirasa tidak ditemukan lagi bug atau kesalahan pada sistem.

3.1.5. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Dalam pembuatan sistem informasi ini dibutuhkan spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras sebagai berikut.

a. Kebutuhan Perangkat Lunak

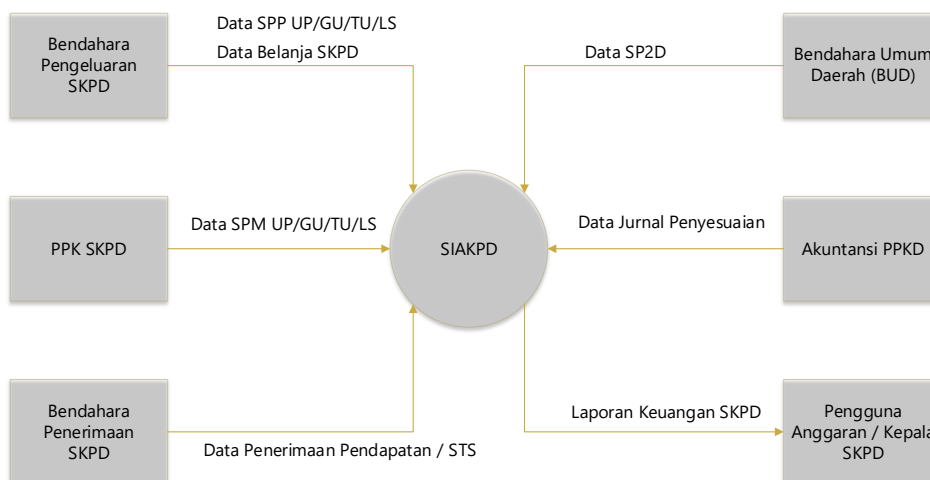
1. *Windows XP/Vista/7/8* sebagai sistem operasi yang digunakan
 2. *Php and Framework Codeigniter* dan *Code Editor*
 3. *MySQL* sebagai database server
 4. *Microsoft Excel* sebagai output pelaporan
- b. Kebutuhan Perangkat Keras
1. Komputer minimum Core i3
 2. RAM minimum 2 GB
 3. Hardisk minimum 250 GB
 4. Monitor
 5. Mouse
 6. Keyboard

3.2. Desain Sistem

Berdasarkan diagram alir kerja (*flow work diagram*) di atas dapat dimodelkan sebuah desain sistem yang sesuai dengan urutan proses yang telah ditetapkan pada gambar diagram alir kerja (*flow work diagram*) di atas, yaitu *Context Diagram*, Diagram Berjenjang, Diagram Alir Data (*Data Flow Diagram*), Desain Basis Data (*Data Base*), Desain Antarmuka (*Interface*).

3.2.1. Diagram Konteks (*Context Diagram*)

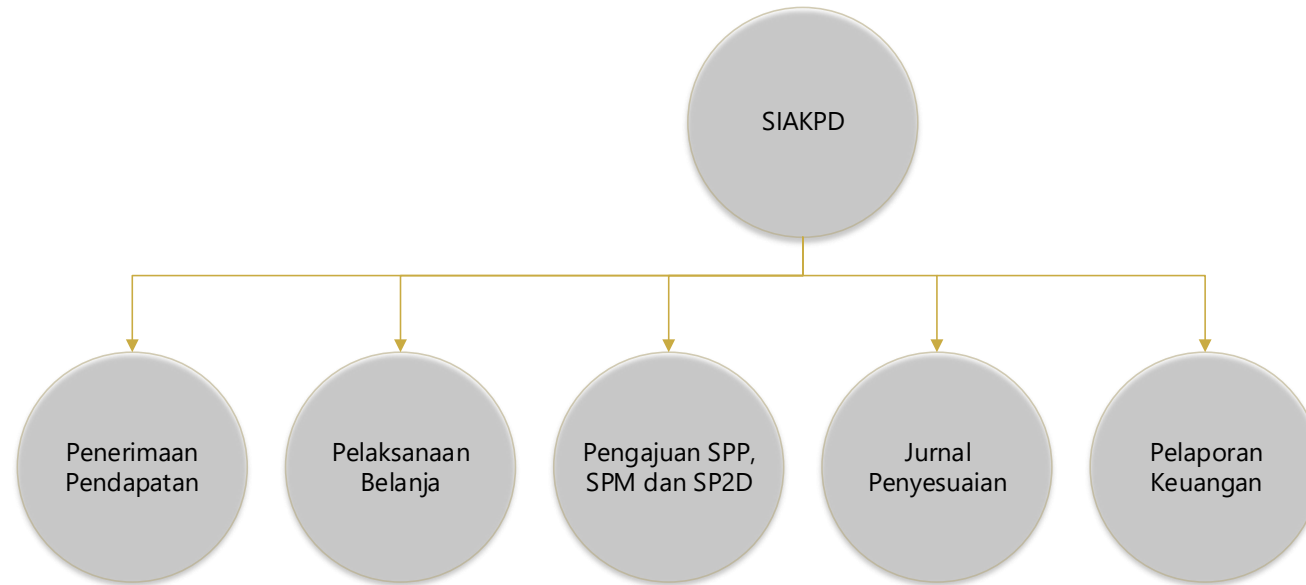
Berdasarkan dari diagram alir kerja (*work flow diagram*) maka dapat dimodelkan sebuah Diagram konteks (*Context Diagram*) Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut.



Gambar 3.3 Diagram Konteks Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Context Diagram diatas menggambarkan proses yang terjadi pada Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas eksternal yang terlibat dalam aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Pejabat Pelaksana Keuangan (PPK), Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Akuntansi PPKD.

3.2.2. Diagram Berjenjang



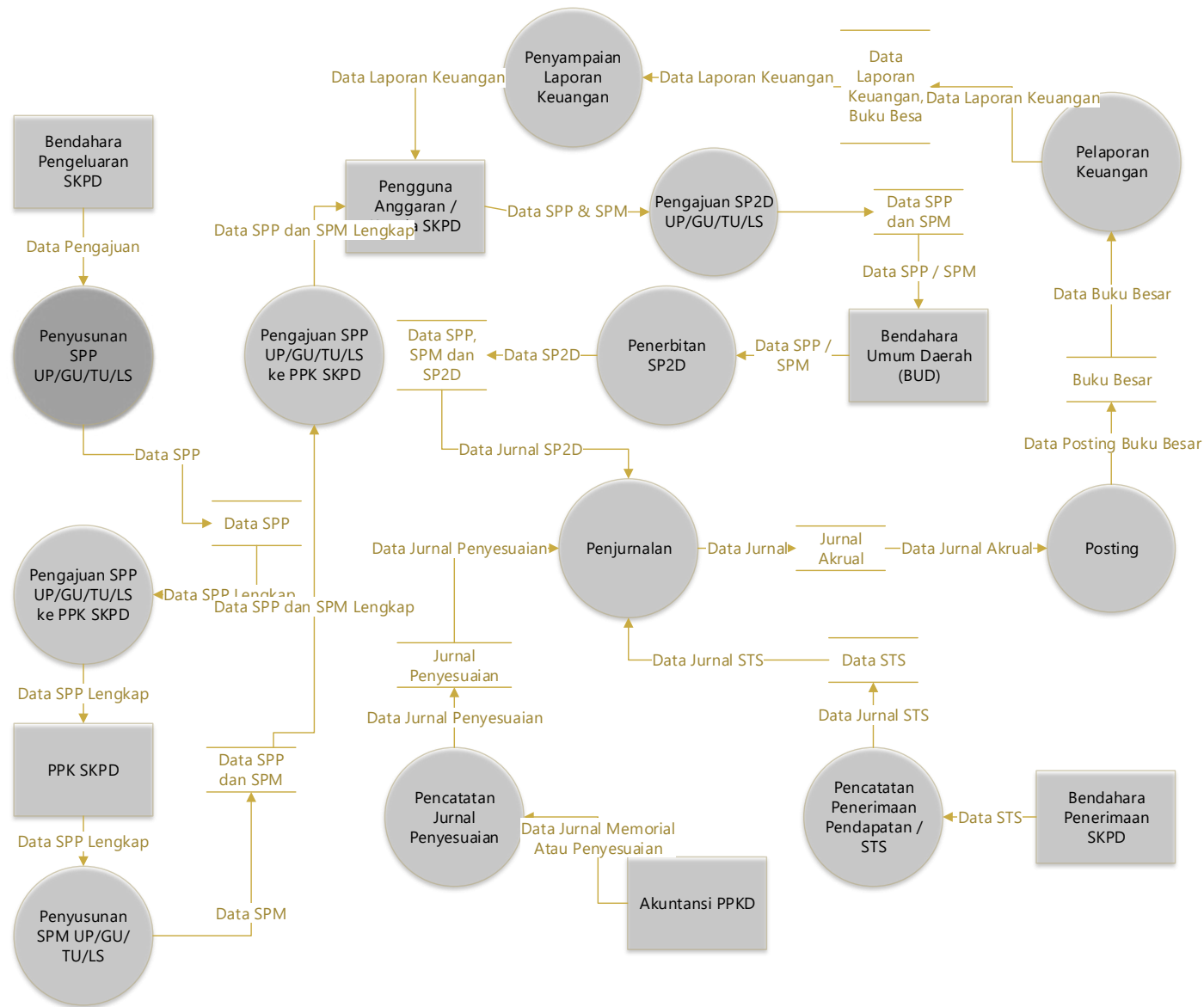
Gambar 3.4 Diagram Berjenjang Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Diagram berjenjang diatas merupakan pemecahan dari proses yang ada pada Aplikasi Sistem Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari proses-proses yang lebih spesifik per level. Untuk level 1 terdapat proses Penyusunan Anggaran, Penerimaan Pendapatan, Pengajuan SPP/SPM/SP2D, Pelaksanaan Belanja, Pencatatan Jurnal Penyesuaian dan Pembuatan Laporan Keuangan.

3.2.3. Diagram Alir Data (*Data Flow Diagram*)

Diagram alir data (*Data Flow Diagram*) adalah diagram yang menunjukkan aliran data yang ada dari tiap-tiap proses yang mungkin terjadi. Dari tiap-tiap proses tersebut dimungkinkan adanya penyimpanan data yang disebut dengan *data storage*.

3.2.3.1 Diagram Alir Data Level 0



Gambar 3.5 Diagram Alir Data Level 0

3.3. Desain Basis Data (*DataBase*)

3.3.1. Desain Tabel

Untuk membuat aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah diperlukan data-data yang disimpan dalam tabel-tabel sebagai berikut.

a. Tabel Master SKPD

Merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data master SKPD, adapun kolom-kolom dan keterangannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Struktur Tabel Master SKPD

Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Deskripsi	Keterangan
IdSKPD	int			<i>Primary Key</i>
SKPD	varchar	250	Nama SKPD	

b. Table Master Akun

Merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data master Akun, adapun kolom-kolom dan keterangannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Struktur Tabel Master Akun

Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Deskripsi	Keterangan
IdAkun	Int			<i>Primary Key</i>
KodeAkun	varchar	50	Kode Akun	
NamaAkun	varchar	250	Nama Akun	

c. Tabel Master Program

Merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data master Program, adapun kolom-kolom dan keterangannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Struktur Tabel Master Program

Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Deskripsi	Keterangan
IdProgram	integer			<i>Primary Key</i>
TA	varchar	4		
KodeProgram	varchar	50		
NamaProgram	varchar	250		

d. Tabel Master Kegiatan

Merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data master Kegiatan, adapun kolom-kolom dan keterangannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Struktur Tabel Master Kegiatan

Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Deskripsi	Keterangan
IdKegiatan	integer			<i>Primary Key</i>
TA	varchar	4		
KodeKegiatan	varchar	50		
NamaKegiatan	varchar	250		

e. Tabel Master BP

Merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data master Bendahara Pengeluaran, adapun kolom-kolom dan keterangannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Struktur Tabel Master BP

Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Deskripsi	Keterangan
IdBP	integer			<i>Primary Key</i>
NamaBP	varchar	250		
NIPBP	varchar	50		

f. Tabel Master BPT

Merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data master Bendahara Penerimaan, adapun kolom-kolom dan keterangannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6. Struktur Tabel Master BPT

Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Deskripsi	Keterangan
IdBPT	integer			<i>Primary Key</i>
NamaBPT	varchar	250		
NIPBPT	varchar	50		

g. Tabel Master PPK

Merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data master Pejabat Pelaksana Keuangan (PPK), adapun kolom-kolom dan keterangannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7. Struktur Tabel Master PPK

Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Deskripsi	Keterangan
IdPPK	integer			<i>Primary Key</i>
NamaPPK	varchar	250		
NIPPPK	varchar	50		

h. Tabel DPA

Merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), adapun kolom-kolom dan keterangannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8. Struktur Tabel DPA

Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Deskripsi	Keterangan
IdDPA	int			<i>Primary Key</i>
TA	varchar	4		
NoDPA	varchar	100		
TgIDPA	date			
Tipe	int			

i. Tabel STS

Merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data Surat Tanda Setoran (STS), adapun kolom-kolom dan keterangannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9. Struktur Tabel STS

Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Deskripsi	Keterangan
IdSTS	integer			<i>Primary Key</i>
TA	varchar	4		
NoSTS	varchar	250		
TglSTS	date			

j. Tabel SPP

Merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data input Surat Perintah Pembayaran (SPP), adapun kolom-kolom dan keterangannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10. Struktur Tabel SPP

Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Deskripsi	Keterangan
IdSPP	integer			<i>Primary Key</i>
TA	varchar	4		
NoSPP	varchar	250		
TglSPP	date			

k. Tabel SPM

Merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data input Surat Perintah Membayar (SPM), adapun kolom-kolom dan keterangannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11. Struktur Tabel SPM

Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Deskripsi	Keterangan
IdSPM	integer			<i>Primary Key</i>
TA	varchar	4		
NoSPM	varchar	250		
TglSPM	date			

l. Tabel SP2D

Merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data input Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), adapun kolom-kolom dan keterangannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12. Struktur Tabel SP2D

Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Deskripsi	Keterangan
IdSP2D	integer			<i>Primary Key</i>
TA	varchar	4		
NoSP2D	varchar	250		
TglSP2D	date			

m. Tabel Jurnal

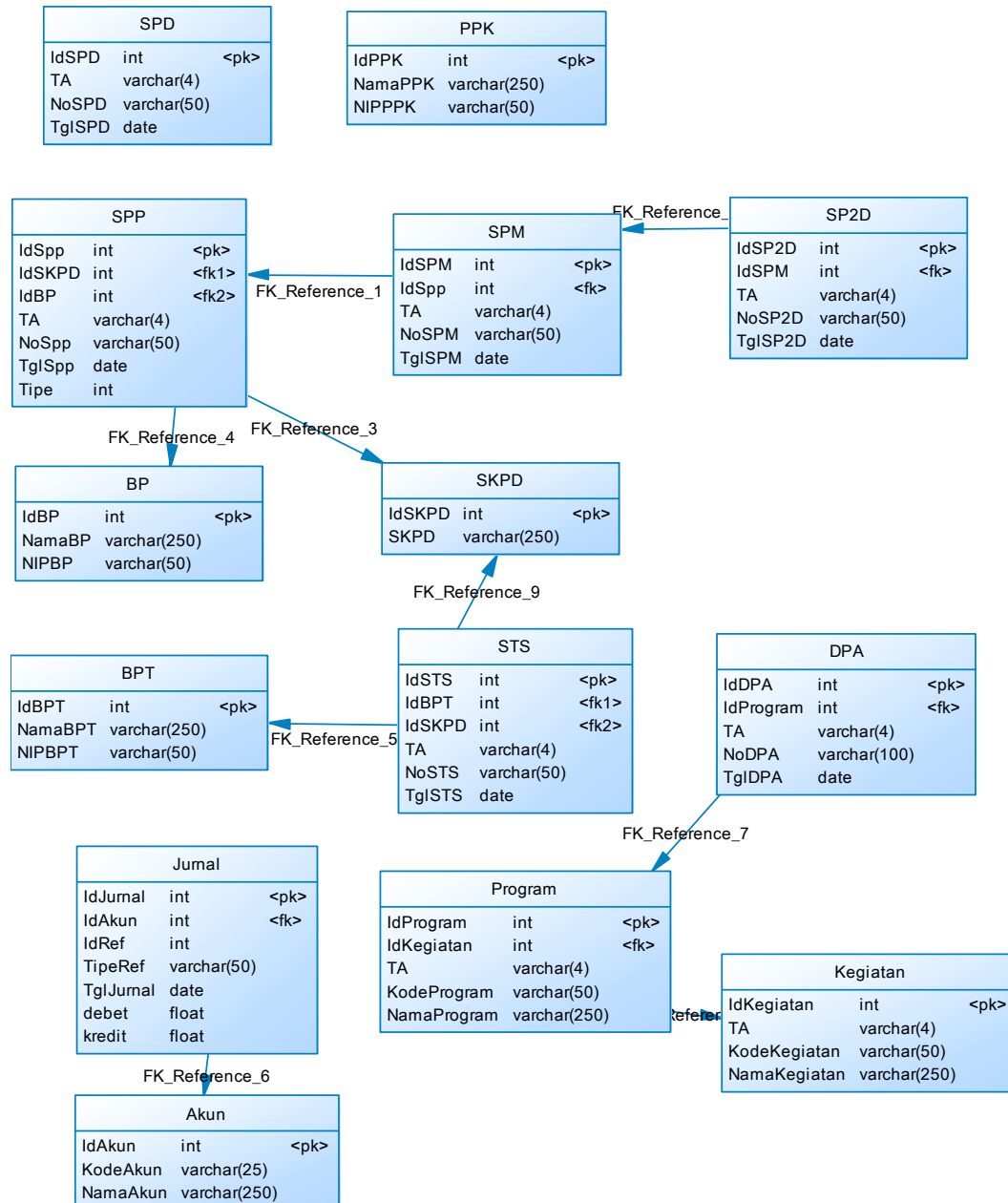
Merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data jurnal, adapun kolom-kolom dan keterangannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13. Struktur Tabel Jurnal

Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Deskripsi	Keterangan
IdJurnal	integer			<i>Primary Key</i>
IdRef	int			
TipeRef	int			
TglJurnal	date			
Debet	float			
Kredit	float			

3.3.2. Entity Relational Diagram (ERD)

Adalah diagram yang menggambarkan hubungan (*relationship*) dari masing-masing tabel yang ada di atas. Maka berdasarkan dari data tabel-tabel di atas dapat digambarkan sebuah *Entity Relational Diagram* (ERD) seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.6 Entity Relational Diagram Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

3.4. Desain Antarmuka (*Interface*)

Antarmuka (*Interface*) adalah bagian yang menghubungkan antara program dengan pemakai. Antarmuka Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dibagi dalam 3 menu, yaitu menu Master Data, menu Penatausahaan dan menu Pelaporan.

3.4.1 Halaman Login

Halaman ini digunakan untuk keamanan sistem. Dengan adanya halaman ini maka keamanan akses data dapat dipertahankan. Hanya *user* yang terdaftar saja yang dapat memasuki sistem.



**SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(SIKPD)**

USER	<input type="text"/>
PASSWORD	<input type="password"/>
<input type="button" value="LOGIN"/>	

Gambar 3.7 Halaman Login

3.4.2 Menu Master Data

Menu ini berisi semua form data master yang digunakan pada aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Form-form itu antara lain :

A. Form Master Organisasi / SKPD

Form ini menampilkan data master Organisasi / SKPD. Terdapat pula fasilitas tambah, edit dan hapus. Desain antarmukanya sebagai berikut :

MASTER SKPD ✕

TAMBAH

NO	KODE ORGANISASI	NAMA ORGANISASI	ACTION
1	I.01.01.01	Dinas Pendidikan	Edit Delete

Gambar 3.8 Gambar Form Master SKPD

B. Form Master Akun

Form ini menampilkan data master akun. Terdapat pula fasilitas tambah, edit, hapus. Desain antarmukanya sebagai berikut :

MASTER KODE AKUN ✕

TAMBAH

NO	KODE AKUN	NAMA AKUN	ACTION
1	I.II.01.001	Kas di Kas Daerah	Edit Delete

Gambar 3.9 Gambar Form Master Akun

C. Form Master Program

Form ini menampilkan data master Program. Terdapat pula fasilitas tambah, edit, hapus. Desain antar mukanya sebagai berikut :

MASTER PROGRAM ✕

TAMBAH

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	ACTION
1	L.O1.O1.O1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Edit Delete

Gambar 3.10 Gambar Form Master Program

D. Form Master Kegiatan

Form ini menampilkan data master kegiatan. Terdapat pula fasilitas tambah, edit, hapus. Desain antar mukanya sebagai berikut :

MASTER KEGIATAN ✕

TAMBAH

NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	ACTION
1	L.O1.O1.O1.15.001	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa SD	Edit Delete

Gambar 3.11 Gambar Form Master Kegiatan

3.4.3 Menu Transaksi Data

Menu ini berisi semua form transaksi yang digunakan pada aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Form-form itu antara lain :

A. Form Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Form ini menampilkan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Terdapat akses approval dari pengguna anggaran dan TAPD. Desain antar mukanya sebagai berikut :

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN X

NO	NOMOR DPA	NAMA KEGIATAN	ACTION
1	1.01.1.01.01.00.00.5.1	Kegiatan Pembayaran Gaji & Tunj Pegawai	Edit Delete

Gambar 3.12 Gambar Form Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kemudian Lembar Approval untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah seperti di bawah ini :

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ✕

LEMBAR APPROVAL DAN PENGESAHAN

	NO DPA	NAMA KEGIATAN	ACTION
<input type="checkbox"/>	1.011.01.01.00.00.5.1	Kegiatan Pembayaran Gaji & Tunj Pegawai	Lihat Detail

Apakah data DPA di atas sudah sesuai dan dapat disetujui ?

Gambar 3.13 Gambar Approval Dokumen Pelaksanaan Anggaran

B. Form Surat Tanda Setoran (STS)

Form ini menampilkan Form Surat Tanda Setoran. Terdapat approval dari Bendahara Penerimaan. Desain antar mukanya sebagai berikut :

SURAT TANDA SETORAN ✕

NO	NOMOR STS	TANGGAL	NOMINAL	ACTION
1	001/STS/1.01.01.01/1/2019	29 Januari 2019	35.000.000,00	Edit Delete

Gambar 3.14 Gambar Form Surat Tanda Setoran

Kemudian form pengesahan atau approval dari pejabat terkait untuk mengesahkan SPP yang diajukan, halaman ini hanya dapat diakses oleh pejabat tersebut sesuai dengan *role access*-nya

SURAT TANDA SETORAN ✕

LEMBAR APPROVAL DAN PENGESAHAN

	NO STS	TANGGAL	NOMINAL	ACTION
<input type="checkbox"/>	001/STS/1.01.01/1/2019	29 Januari 2019	35.000.000,00	Lihat Detail

Apakah data STS di atas sudah sesuai dan dapat disetujui ?

Gambar 3.15 Gambar Approval Surat Tanda Setoran

Selanjutnya Lembar Jurnal pada Surat Tanda Setoran adalah hasil *generate* dari transaksi input STS. Seperti di bawah ini :

SURAT TANDA SETORAN ✕

JURNAL SURAT TANDA SETORAN

	AKUN	DEBET	KREDIT	ACTION
	1.1.1.01.001 - Kas di Kas Daerah	35.000.000,00		Edit Delete
	4.1.1.01.001 - Pendapatan		35.000.000,00	
		35.000.000,00	35.000.000,00	BALANCE

Gambar 3.16 Gambar Jurnal Surat Tanda Setoran

C. Form Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Form ini menampilkan data Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Terdapat kolom Dokumen SPJ dan Belanja, juga approval oleh Bendahara Pengeluaran. Desain antar mukanya sebagai berikut :

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ✖

TAMBAH

NO	NOMOR SPP	TANGGAL	NOMINAL	ACTION
1	001/SPP/L01.L01.01/1/2019	5 Januari 2019	240.000.000,00	Edit Delete

Gambar 3.17 Gambar Form Surat Permintaan Pembayaran

Kemudian form pengesahan atau approval dari pejabat terkait untuk mengesahkan SPP yang diajukan, halaman ini hanya dapat diakses oleh pejabat tersebut sesuai dengan *role access*-nya

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN ✖

LEMBAR APPROVAL DAN PENGESAHAN

	NO SPP	TANGGAL	NOMINAL	ACTION
<input type="checkbox"/>	001/SPP/L01.L01.01/1/2019	5 Januari 2019	240.000.000,00	Lihat Detail

Apakah data SPP di atas sudah sesuai dan dapat disetujui ?

Gambar 3.18 Gambar Approval Surat Permintaan Pembayaran

D. Form SPM

Form ini menampilkan data input Surat Perintah Membayar (SPM). Terdapat potongan dan pajak, disertai juga approval Pengguna Anggaran. Desain antar mukanya sebagai berikut :

SURAT PERINTAH MEMBAYAR ✕

NO	NOMOR SPM	TANGGAL	NOMINAL	ACTION
1	001/SPM/L.01.01.01/2019	7 Januari 2019	245.000.000,00	Edit Delete

Gambar 3.19 Gambar Form Surat Perintah Membayar

Kemudian form pengesahan atau approval dari pejabat terkait untuk mengesahkan SPM yang diajukan, halaman ini hanya dapat diakses oleh pejabat tersebut sesuai dengan *role access*-nya

SURAT PERINTAH MEMBAYAR ✕

LEMBAR APPROVAL DAN PENGESAHAN

	NO SPM	TANGGAL	NOMINAL	ACTION
<input type="checkbox"/>	001/SPM/L.01.01.01/2019	7 Januari 2019	245.000.000,00	Lihat Detail

Apakah data SPM di atas sudah sesuai dan dapat disetujui ?

Gambar 3.20 Gambar Approval Surat Perintah Membayar

E. Form SP2D

Form ini menampilkan data input Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Terdapat potongan dan pajak setelah terbit SP2D dan approval oleh BUD. Desain antar mukanya sebagai berikut :

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ✕

TAMBAH

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL	NOMINAL	ACTION
1	001/SP2D/L01.01.01/1/2019	8 Januari 2019	245.000.000,00	Edit Delete

Gambar 3.21 Gambar Form Surat Perintah Pencairan Dana

Kemudian form pengesahan atau approval dari pejabat terkait untuk mengesahkan SP2D yang diajukan, halaman ini hanya dapat diakses oleh pejabat tersebut sesuai dengan *role access-nya*

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA X

LEMBAR APPROVAL DAN PENGESAHAN

	NO SP2D	TANGGAL	NOMINAL	ACTION
<input type="checkbox"/>	001/SP2D/1.01.01.01/1/2019	8 Januari 2019	240.000.000,00	Lihat Detail

Apakah data SP2D di atas sudah sesuai dan dapat disetujui ?

Gambar 3.22 Gambar Approval Surat Perintah Pencairan Dana

Selanjutnya Lembar Jurnal pada Surat Perintah Pencairan Dana adalah hasil *generate* dari transaksi input SP2D. Seperti di bawah ini :

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA X

JURNAL SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

	AKUN	DEBET	KREDIT	ACTION
	5.1.1.01.001 - Belanja Gaji	175.000.000,00		Edit Delete
	5.1.1.01.001 - Belanja Tunjangan	65.000.000,00		
	1.1.1.01.001 - Kas di Kas Daerah		240.000.000,00	
		240.000.000,00	240.000.000,00	BALANCE

Gambar 3.23 Gambar Jurnal Surat Perintah Pencairan Dana

3.5 Skenario Pengujian

Pada penelitian ini untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah dengan metode akrual telah berjalan dengan baik adalah dengan melihat hasil penjurnalan setiap transaksi yang terjadi. Karena metode yang digunakan adalah perubahan dari berbasis kas menjadi berbasis jurnal, maka setiap transaksi yang membentuk jurnal dipastikan sudah memenuhi kaidah jurnal berbasis akrual.

Kemudian dapat dipastikan juga laporan keuangan yang dihasilkan telah sesuai dengan format laporan keuangan yang ada pada lampiran Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Maka untuk melakukan pengujian sesuai dengan kaidah jurnal berbasis akrual dan apakah telah sesuai dengan pelaporan keuangan menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, maka diperlukan seorang ahli akuntansi pemerintah daerah untuk mengecek kebenaran dan kevalidan jurnal akuntansi yang terbentuk, dan memperhatikan proses-proses penatausahaan yang terjadi sehingga menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan peraturan.